Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 17847-17854

DINAMIKA IMPLEMENTASI SAK EMKM: ORIENTASI KOMITMEN DAN LEGITIMACY PADA UD PURNOMO KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH

Nita Dyah Ayu Lestari[1], Bonnix Hedy Maulana[2], Heni Risnawati[3]

[1,2,3] Program Study S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Pendidikan dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus

Email: nitadyahayu818@gmail.com, Bonnixmaulana@umkudus.ac.id, henirisnawati@umkudus.ac.id
Corresponding Author: Nita Dyah Ayu Lestari, nitadyahayu818@gmail.com

Published: Maret , 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of the implementation of the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) at UD Purnomo, located in Pati Regency, Central Java. The study focuses on the phenomenon of the non-implementation of SAK EMKM with a compliance theory approach and the continued use of simple financial records by business owners. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method, with UD Purnomo as the unit of analysis selected purposively. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The obtained data were analyzed thematically to understand the meaning, perceptions, and internal considerations behind the financial record-keeping practices carried out. Based on this study, it is concluded that UD Purnomo has not implemented SAK EMKM and still uses simple cash records that are influenced by the business owner's internal perceptions and beliefs, rather than by considerations of economic benefits, risks, or external pressures. Normative commitment and perceptions of legitimacy towards SAK EMKM are still low; the standards are not seen as a moral obligation or professional responsibility. Compliance with the Indonesian MSME Financial Accounting Standards (SAK) is more normative-legitimative than instrumental, determined by moral values, internal beliefs, and perceived legitimacy of business actors. Research results indicate that efforts to improve the implementation of Indonesian MSME Financial Accounting Standards (SAK) in micro-enterprises require an approach that emphasizes strengthening normative commitment and legitimacy of accounting standards, rather than solely through technical training or regulatory enforcement.

Keywords: Indonesian MSME Financial Accounting Standards (SAK), Simplified Financial Recording, Micro-enterprises, Normative Perspective, Legitimacy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UD Purnomo yang berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian difokuskan pada fenomena belum diterapkannya SAK EMKM dengan pendekatan teori kepatuhan serta masih digunakannya pencatatan keuangan sederhana oleh pemilik usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, dengan UD Purnomo sebagai unit analisis yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk memahami makna, persepsi, serta pertimbangan internal yang melatarbelakangi praktik pencatatan keuangan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa UD Purnomo belum menerapkan SAK EMKM dan masih menggunakan pencatatan kas sederhana yang dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan internal pemilik usaha, bukan oleh pertimbangan manfaat ekonomi, risiko, atau tekanan eksternal. Komitmen normatif dan persepsi legitimasi terhadap SAK EMKM masih rendah; standar tersebut belum dipandang sebagai kewajiban moral maupun tanggung jawab profesional. Kepatuhan terhadap SAK EMKM lebih bersifat normatif–legitimatif daripada instrumental, ditentukan oleh nilai moral, keyakinan internal, dan legitimasi perseptif pelaku usaha Hasil penelitian mengindikasikan bahwa upaya peningkatan penerapan SAK EMKM pada usaha mikro memerlukan pendekatan yang menekankan penguatan komitmen normatif dan legitimasi standar akuntansi, bukan semata-mata melalui pelatihan teknis atau penegakan regulasi.

Kata Kunci: SAK EMKM, Pencatatan Keuangan Sederhana, Usaha Mikro, Perspektif Normatif, Legitimasi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025). Menurut Storey (2016), UMKM juga berperan sebagai tulang punggung ekonomi karena fleksibilitasnya dalam menghadapi dinamika pasar dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Selain itu, Beck, Demirguc-Kunt, & Levine (2005) menekankan bahwa UMKM berfungsi sebagai mekanisme penting dalam inklusi keuangan dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Untuk mendukung kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada sektor ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai standar akuntansi khusus yang disesuaikan dengan karakteristik, kapasitas, dan kompleksitas usaha mikro (IAI, 2016). Menurut Wibowo (2018), SAK EMKM dirancang agar pelaku usaha mikro dapat melakukan pencatatan keuangan secara sistematis tanpa terbebani prosedur akuntansi yang kompleks, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan usaha yang lebih tepat dan efisien.

SAK EMKM diterapkan melalui sistem pelaporan keuangan yang sederhana dan praktis dengan tujuan menciptakan pencatatan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Standar ini dirancang untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan usaha, meningkatkan kredibilitas UMKM, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan dukungan eksternal, khususnya dari lembaga keuangan dan pemerintah, guna mendorong keberlanjutan usaha secara jangka panjang (Khairani Ulfa & Astika Putra, 2024). Sejalan dengan itu, Hanafi dan Halim (2017) menekankan bahwa laporan keuangan yang tertata rapi dan akuntabel menjadi instrumen penting bagi UMKM dalam membangun kepercayaan investor, mengakses kredit, dan merencanakan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM pada usaha mikro masih tergolong rendah. Fenomena yang banyak dijumpai adalah penggunaan pencatatan keuangan sederhana yang terbatas pada transaksi kas masuk dan kas keluar tanpa penyusunan laporan keuangan formal sesuai standar, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (Khairunnisa dkk., 2025). Menurut Rahayu dan Day (2017), rendahnya penerapan standar akuntansi pada UMKM disebabkan oleh kendala internal pelaku usaha, termasuk keterbatasan pengetahuan akuntansi, sumber daya manusia yang minim, dan persepsi bahwa pencatatan formal tidak terlalu penting untuk kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif penyusunan standar akuntansi dan praktik pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menjelaskan rendahnya penerapan SAK EMKM melalui pendekatan instrumental, seperti keterbatasan literasi akuntansi, minimnya pelatihan, keterbatasan teknologi pencatatan, rendahnya persepsi manfaat ekonomi, serta tidak adanya sanksi yang bersifat mengikat (Safrudin dkk., 2023). Menurut Haryanto (2019), pendekatan instrumental cenderung menekankan faktor eksternal dan teknis, tetapi belum mampu menjelaskan perilaku pelaku usaha yang telah menyadari pentingnya pencatatan keuangan, tetapi tetap memilih untuk tidak menerapkan standar akuntansi secara formal.

UD Purnomo merupakan salah satu usaha mikro yang berada dalam kondisi tersebut. Pencatatan keuangan pada usaha ini telah dilakukan secara rutin, namun masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada SAK EMKM, karena pemilik usaha meyakini bahwa sistem pencatatan yang diterapkan saat ini telah memadai untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan usaha dan pengambilan

keputusan operasional sehari-hari, tanpa memandang perlunya penerapan standar akuntansi formal sebagai sebuah kewajiban profesional (Aini dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Suchman (1995) yang menyatakan bahwa legitimasi organisasi dipengaruhi oleh persepsi internal dan eksternal mengenai relevansi aturan formal; jika aturan tidak dianggap memberi manfaat nyata, maka tingkat kepatuhan cenderung rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk memahami ketidakpenerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya dari sudut pandang teknis dan instrumental, tetapi juga dari perspektif normatif dan legitimasi. Menurut DiMaggio & Powell (1983), organisasi cenderung menyesuaikan diri dengan tekanan sosial dan norma lingkungan, namun kepatuhan formal dapat terhambat jika norma internal dan keyakinan pelaku usaha tidak selaras dengan aturan eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika belum diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada UD Purnomo dengan menekankan peran persepsi, nilai, dan keyakinan internal pemilik usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif normatif dan legitimasi dalam menjelaskan perilaku ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi pada usaha mikro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam realitas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UD Purnomo di Kabupaten Pati. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada pemaknaan terhadap praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang dijalankan pelaku usaha.

Subjek penelitian adalah UD Purnomo sebagai pelaku UMKM, sedangkan objek penelitian mencakup praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang dikaitkan dengan penerapan SAK EMKM. Fokus kajian meliputi pencatatan keuangan secara manual, pemahaman akuntansi, pengakuan pendapatan, pengukuran aset, serta penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Populasi penelitian melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan administrasi usaha. Informan ditentukan menggunakan purposive sampling, yang terdiri atas pemilik usaha, pengelola administrasi, karyawan produksi dan fhinising, serta pihak eksternal yang relevan seperti Kantor Akuntansi Publik dan Dinas Koperasi dan UMKM. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini tidak menggunakan uji statistik karena bersifat kualitatif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan pada UD Purnomo masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pemilik usaha menyatakan bahwa sejak awal berdirinya usaha, pencatatan keuangan hanya dilakukan dalam bentuk pencatatan kas masuk dan kas keluar. Hal ini tercermin dalam pernyataan informan pemilik UD Purnomo: *"Sejak awal usaha berdiri sudah ada pencatatan, tapi ya sederhana saja, cuma catat uang masuk sama uang keluar."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi dipahami secara fungsional dan terbatas pada kebutuhan praktis jangka pendek.

Ketidakpenerapan SAK EMKM tidak disebabkan oleh sikap penolakan terhadap akuntansi, melainkan oleh persepsi bahwa sistem pencatatan sederhana telah dianggap memadai untuk pengelolaan usaha. Informan pemilik dan pengelola ID Purnomo menegaskan : *"Menurut saya pencatatan yang sekarang sudah cukup untuk usaha. Yang penting tahu uang masuk, uang keluar, sama untung atau*

rugi. Kalau pakai standar itu kelihatannya ribet." Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan terhadap standar lebih bersifat perseptif dan normatif, bukan teknis semata.

Penelitian juga menemukan bahwa pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi belum dilakukan secara tegas. Hal ini diakui oleh pemilik usaha dan pengelola yang menyatakan: *"Belum sepenuhnya. Kadang masih campur, karena usaha ini juga sumber utama penghasilan keluarga."* Kondisi ini berdampak pada ketidakjelasan informasi kinerja keuangan usaha dan lemahnya akuntabilitas pelaporan.

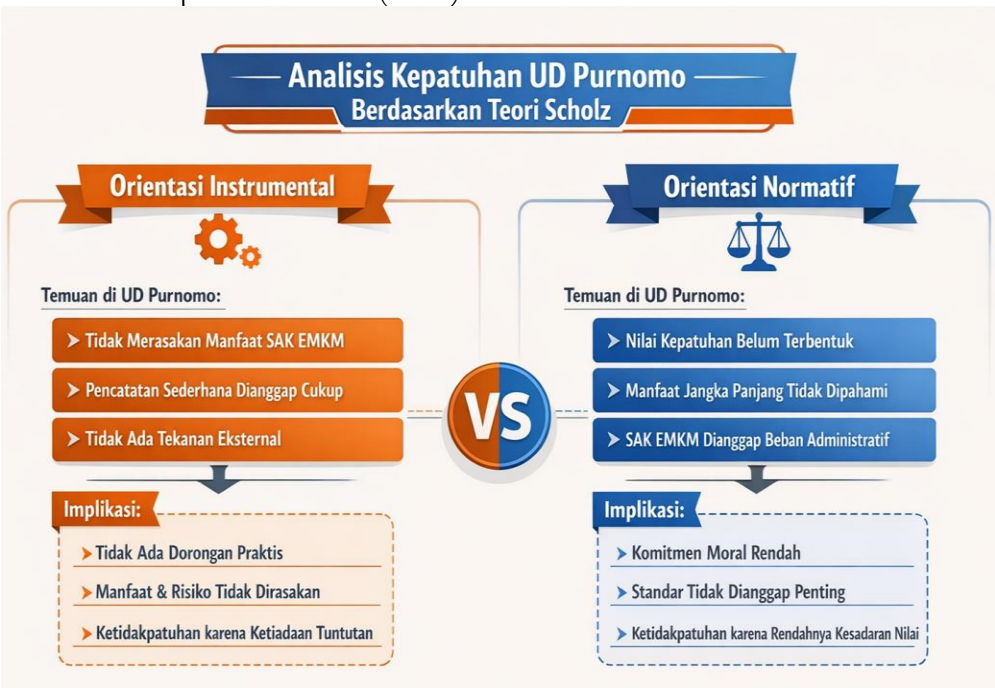
Dari sisi operasional, UD Purnomo menerapkan sistem produksi berdasarkan pesanan (made by order). Namun, pencatatan biaya produksi belum dilakukan secara sistematis. Pemilik menjelaskan: *"Biaya produksi belum dicatat rinci. Biasanya cuma kira-kira saja, yang penting harga jual masih untung."* Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi belum menjadi dasar rasional dalam penetapan harga jual, melainkan lebih berbasis pada perkiraan pengalaman praktis.

Hambatan internal dalam penerapan SAK EMKM meliputi keterbatasan pemahaman akuntansi, rendahnya disiplin keuangan, serta ketidaktahuan terhadap pengakuan pendapatan dan pengukuran aset sesuai standar. Selain itu, meskipun terdapat dukungan eksternal berupa sosialisasi dan program pelatihan dari pemerintah, pendampingan yang bersifat berkelanjutan belum dirasakan secara langsung oleh UD Purnomo. Informan dari dinas koperasi dan UMKM menyampaikan: *"Pernah ada sosialisasi dari dinas, tapi belum pernah pendampingan langsung yang rutin."*

Meskipun demikian, terdapat keterbukaan terhadap dukungan eksternal apabila disertai dengan pendampingan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam pernyataan informan KAP: *"Kalau ada yang dampingi langsung dan mudah dipakai, mungkin bisa dicoba. Tapi kalau harus belajar sendiri, biasanya susah konsisten."* Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAK EMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi dan fasilitas, tetapi sangat ditentukan oleh internalisasi nilai, persepsi kemudahan, serta kesinambungan pendampingan dalam praktik usaha sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa ketidakpenerapan SAK EMKM pada UD Purnomo lebih dipengaruhi oleh faktor normatif dan legitimatif, yaitu cara pandang, keyakinan internal, serta persepsi legitimasi terhadap standar akuntansi, dibandingkan oleh faktor instrumental semata seperti insentif ekonomi atau tekanan eksternal

Gambar Temuan Teori Kepatuhan Scholz (1984)



Gambar 1. Teori Scholz
Sumber: Diolah Peneliti

Gambar Teori Kepatuhan Tyler–Blader (2005)



Gambar 2. Teori Tyler-Blader
Sumber: Diolah Peneliti

Ditinjau dari teori kepatuhan Scholz, ketidakpatuhan terhadap SAK EMKM dipengaruhi oleh rendahnya orientasi instrumental dan normatif, yang ditandai oleh tidak dirasakannya manfaat langsung, ketiadaan tekanan eksternal, serta belum terbentuknya kesadaran nilai dan komitmen moral pemilik usaha. Selaras dengan teori Tyler–Blader, komitmen normatif dan persepsi legitimasi terhadap SAK EMKM juga masih lemah, sehingga standar tersebut belum dipandang sebagai kewajiban moral maupun tanggung jawab profesional.

Dengan demikian, secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan UMKM terhadap SAK EMKM bersifat normatif–legitimatif, bukan instrumental–normatif. Kepatuhan tidak muncul dari adanya keuntungan langsung atau tekanan luar, tetapi dari nilai moral, keyakinan internal, dan persepsi legitimasi terhadap standar akuntansi. Temuan ini konsisten dengan argumen Tyler bahwa kepatuhan sukarela (voluntary compliance) jauh lebih stabil ketika bersumber dari persepsi legitimasi dan komitmen normatif, bukan tekanan atau imbalan jangka pendek.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas praktik pencatatan keuangan UMKM berpengaruh langsung terhadap tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pada UD Purnomo, pencatatan keuangan yang masih bersifat sederhana, manual, serta tidak terstruktur menyebabkan SAK EMKM belum dapat diterapkan secara optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik akuntansi dasar menjadi prasyarat penting dalam penerapan standar akuntansi formal pada UMKM.

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada teori kepatuhan (compliance theory) yang dikemukakan oleh Scholz serta Tyler–Blader, yang menekankan bahwa perilaku kepatuhan individu atau organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi dan insentif, tetapi juga oleh faktor internal berupa nilai, kesadaran, komitmen, dan persepsi legitimasi terhadap suatu aturan. Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan dinamika implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UD Purnomo.

Ditinjau dari perspektif teori kepatuhan Scholz, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan UD Purnomo dalam menerapkan SAK EMKM dipengaruhi oleh lemahnya orientasi instrumental dan normatif. Orientasi instrumental belum terbentuk secara optimal karena pemilik usaha tidak merasakan manfaat langsung dari penerapan SAK EMKM, baik dalam hal peningkatan

akses permodalan, efisiensi pengelolaan usaha, maupun peningkatan kredibilitas usaha. Selain itu, ketiadaan tekanan eksternal dari pihak perbankan, pemerintah, maupun lembaga pembina UMKM menyebabkan penerapan SAK EMKM belum dipersepsikan sebagai kebutuhan yang mendesak. Kondisi ini membuat kepatuhan tidak didorong oleh pertimbangan rasional mengenai keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari penerapan standar akuntansi.

Pada saat yang sama, orientasi normatif pemilik usaha juga belum berkembang secara kuat. Nilai dan kesadaran mengenai pentingnya akuntansi formal belum terinternalisasi sebagai kewajiban moral atau tanggung jawab profesional dalam pengelolaan usaha. Pemilik usaha masih memandang pencatatan keuangan sebatas sebagai alat bantu sederhana untuk mengetahui arus kas, bukan sebagai instrumen akuntabilitas dan pengambilan keputusan strategis. Lemahnya orientasi normatif ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAK EMKM belum tumbuh dari kesadaran internal, melainkan masih bergantung pada kebutuhan praktis sesaat.

Selanjutnya, berdasarkan teori kepatuhan Tyler–Blader, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya komitmen normatif pemilik usaha berbanding lurus dengan lemahnya persepsi legitimasi terhadap SAK EMKM. SAK EMKM belum dipandang sebagai aturan yang sah, relevan, dan layak dipatuhi secara sukarela, melainkan sebagai ketentuan administratif yang kompleks dan kurang sesuai dengan kondisi operasional usaha sehari-hari. Persepsi ini menyebabkan pemilik usaha tidak merasa memiliki kewajiban moral untuk mematuhi standar tersebut, meskipun terdapat kesadaran awal mengenai pentingnya pencatatan keuangan.

Lemahnya persepsi legitimasi ini berdampak langsung pada perilaku kepatuhan. Pemilik usaha cenderung mempertahankan praktik pencatatan keuangan sederhana yang bersifat manual, informal, dan tidak terstruktur. Ketidakpatuhan terhadap SAK EMKM menjadi bersifat berkelanjutan karena tidak adanya dorongan internal yang kuat untuk berubah. Hal ini sejalan dengan pandangan Tyler bahwa kepatuhan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila individu atau pelaku usaha memandang aturan sebagai sesuatu yang adil, sah, dan mencerminkan nilai yang mereka yakini.

Dengan demikian, kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kepatuhan UMKM terhadap SAK EMKM lebih tepat dipahami sebagai kepatuhan normatif–legitimatif, bukan kepatuhan yang didorong oleh pertimbangan instrumental semata. Kepatuhan tidak muncul karena adanya insentif ekonomi atau tekanan eksternal, tetapi sangat bergantung pada nilai moral, keyakinan internal, serta persepsi pelaku usaha terhadap legitimasi standar akuntansi itu sendiri. Temuan ini menguatkan argumen Tyler bahwa kepatuhan sukarela (voluntary compliance) akan lebih berkelanjutan dan stabil apabila bersumber dari persepsi legitimasi dan komitmen normatif, dibandingkan kepatuhan yang hanya didorong oleh sanksi atau imbalan jangka pendek

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Manehat dan Sanda (2022), Nurazizah dan Zulkarnain (2022), serta Tatik dkk. (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi akuntansi dan praktik pencatatan sederhana menjadi penyebab utama belum optimalnya penerapan SAK EMKM. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa struktur operasional usaha yang tradisional, pengelolaan keuangan yang bersifat informal, serta kesenjangan antara dukungan yang tersedia dan dukungan yang benar-benar diterima UMKM turut memperkuat kondisi ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi.

Secara implikatif, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAK EMKM tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan program pembinaan, tetapi juga pada kesiapan internal UMKM serta efektivitas penyampaian dukungan eksternal. Pendekatan kepatuhan berbasis kesadaran, legitimasi, dan pendampingan berkelanjutan menjadi strategi yang lebih relevan untuk mendorong penerapan SAK EMKM secara konsisten pada UMKM seperti UD Purnomo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UD Purnomo belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) karena pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, serta ketidakpatuhan tersebut tidak didorong oleh faktor instrumental seperti insentif ekonomi atau tekanan eksternal, melainkan oleh lemahnya

internalisasi nilai, norma, dan legitimasi standar akuntansi dalam sistem keyakinan pemilik usaha. Ketidakpenerapan SAK EMKM pada UD Purnomo mencerminkan lemahnya kepatuhan normatif–legitimatif, yang ditandai oleh pencatatan keuangan sederhana dan belum terinternalisasinya nilai, norma, serta legitimasi standar akuntansi, bukan oleh mekanisme kepatuhan instrumental.

Ditinjau dari teori kepatuhan Scholz, ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya orientasi instrumental dan normatif, karena pemilik usaha tidak merasakan manfaat langsung dari penerapan standar dan tidak menghadapi tekanan eksternal yang mendorong kepatuhan. Selanjutnya, berdasarkan teori Tyler–Blader, rendahnya persepsi legitimasi terhadap SAK EMKM menyebabkan komitmen normatif pemilik usaha belum terbentuk secara optimal. Dengan demikian, ketidakpatuhan UD Purnomo lebih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran, pemahaman, dan legitimasi terhadap standar akuntansi dibandingkan oleh keterbatasan teknis semata

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan UMKM terhadap SAK EMKM tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknis atau sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh ketiadaan manfaat langsung, rendahnya persepsi legitimasi terhadap standar, serta tidak adanya tekanan eksternal yang mendorong kepatuhan. Melalui integrasi teori kepatuhan Scholz dan teori Tyler–Blader, penelitian ini mengungkap bahwa kepatuhan UMKM terhadap SAK EMKM terbentuk atas dasar pertimbangan normatif dan legitimasi, bukan semata-mata didorong oleh motif instrumental sehingga kepatuhan tidak terbentuk secara alamiah ketika standar belum dipersepsikan relevan dan bernilai bagi pelaku usaha.

Penelitian ini lebih mengarah pada komitmen normatif dan legitimasi karena kepatuhan UD Purnomo terhadap SAK EMKM tidak dipicu oleh manfaat langsung, risiko, atau tekanan eksternal, melainkan oleh persepsi internal pemilik usaha terhadap nilai dan relevansi standar akuntansi. Pemilik usaha tidak menghadapi tuntutan dari pihak luar dan tidak merasakan insentif praktis dari penerapan SAK EMKM, sehingga faktor instrumental tidak berperan. Sebaliknya, ketidakpatuhan terjadi karena SAK EMKM belum dipersepsikan sebagai aturan yang sah, relevan, dan layak dipatuhi, serta belum terinternalisasi sebagai kewajiban moral atau profesional. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan UMKM terhadap SAK EMKM menuntut pendekatan pembinaan yang berfokus pada penguatan legitimasi standar dan internalisasi nilai akuntabilitas, bukan semata-mata pada aspek teknis atau regulatif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa ketidakpatuhan UMKM terhadap SAK EMKM lebih dipengaruhi oleh aspek persepsi, legitimasi, dan nilai internal pelaku usaha, bukan semata-mata oleh keterbatasan literasi akuntansi atau kapasitas teknis sebagaimana banyak diasumsikan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan UMKM terhadap SAK EMKM bersifat normatif–legitimatif, sehingga peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan pembinaan yang menekankan penguatan legitimasi standar dan internalisasi nilai akuntabilitas, bukan hanya pelatihan teknis atau regulasi formal.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian kepatuhan UMKM terhadap standar akuntansi dengan mengintegrasikan perspektif normatif, legitimasi, dan institusional secara lebih komprehensif. Pendekatan ini penting untuk memperkaya pemahaman bahwa kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh faktor teknis dan instrumental, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai, norma, dan legitimasi sosial terhadap standar akuntansi.

REFERENCES

Adila. (2020). *Jurnal akuntansi, perpajakan dan auditing*. *1*(2), 176–195.

Aini, F. Q., Arisyanada, M. S., & Mas, N. (2025). *Analisis Penerapan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Umkm Martina Rasa Cake dan Bakery*. *6*(1), 91–96.

Al-fauzan, M. A., Raihan, M., Anzani, S. R., Alzena, T., Arif, W., & Kurniati, F. (2024). *Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting SAK EMKM sebagai Pilar Akuntansi UMKM : Studi Kasus pada Mayeng Kopi*. *1*(12), 1373–1380.

Andayani, E., Prasetyo, A., & Yusuf, M. (2021). Pembinaan Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dalam

Pelaksanan Pp 23 Tahun 2018 Di Wilayah Jakarta. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *3*(2), 143–149. https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1277

Fibrina, N. N., & Andriani, S. (2025). Journal of Accounting And Financial Issue. *JAFIS (Journal of Accounting And Financial Issue)*, *Volume 6*. https://mail.ejournalwiraraja.com/index.php/JAFIS/article/view/4321

Gideon Setyo Budiwitjaksono, Rima Anggun Aprilya, Sintha Dayu Aringgani, Devi Istyalita, Wakhidatul Ummah, & Moch. Rizky Ramadhan. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, *1*(3), 31–49. https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: IAI.

Kalsum, U., Ikhtiari, K., Dwiyanti, R., & Indonesia, U. M. (2020). Laporan Keuangan Umkm Di Food City Pasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *3*(2), 92–103. https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). Statistik UMKM Indonesia 2025. Jakarta: Kemenkop UKM RI.

Khairani Ulfa, M., & Astika Putra, H. (2024). MENGUNGKAP KENDALA PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM DI KECAMATAN SANDUBAYA Revealing Obstacles in The Implementation of SAK EMKM on MSMEs in Sandubaya District. *Nusantara Hasana Journal*, *3*(11), Page.

Khairunnisa, A., Nafrilla, D., Hani, F., Pratama, R. A., DwiAnti, I., & Septiana, E. (2025). Implementasi SAK UMKM dalam Pelaporan Keuangan Sederhana UMKM Kuliner atau UMKM Produsen Cemilan. *urnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, *3*(4), 431–438.

Langi, L. C., Elim, I., & Latjandu, Lady. (2025). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro di Apotek Manggala Jaya Manado. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, *3*(1), 74–86. https://doi.org/10.58784/mbkk.280

Manehat, B. Y., & Sanda, F. O. (2022). Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Di Indonesia Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *10*(1), 2–11.

Muchlis Mustarini, D., & Nurul Fathah, R. (2023). Implementasi pemahaman dan kesiapan SAK EMKM pada UMKM Giri Sembada. *NCAF: Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, *5*, 229–242. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art27

Nasution, D. P., Faried, A. I., & Agustino, A. (2021). Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM di Indonesia. *Digital Repository Universitas Jember*, *6*(September 2019), 2019–2022.

Nurazizah, N., & Zulkarnain, Z. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (Sak Emkm) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, *1*(2), 176–187. https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5398

Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 1–15.

Setiawan, A., Sari, W., Afif, A., Yahya, R. F., & Mayasafitri, R. (2024). Implementation of SAK E-MKM: Key Factor in Improving MSME Performance. *Jurnal Akuntansi*, *16*(1), 183–194. https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.8239

Tatik, S., Gesta, R., & Rais, P. (2024). *JAM , Volume 3 , No 1 , April 2024 ISSN : 2962-6927 Analisis Penerapan Akuntansi SAK UMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus UMKM Kota Lhokseumawe) Program Studi Akuntansi , Universitas Malikussaleh , Lhokseumawe Gambar 1 . 1 Data Perke*. *3*(1), 135–144.

Utami, R., & Fauzi, A. (2023). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, *3*(1), 90–94.

Utari, R., Harahap, I., & Syahbudi, M. (2022). Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *10*(3), 491–498.

https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1449
Yusuf, S., Seftiana, E., & Lidyah, R. (2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Sendi Perekonomian Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, *3*(2), 30–47. https://doi.org/10.26905/jrei.v3i2.9122